

**PEMETAAN RISIKO BENCANA KONFLIK
DI KOTA SURAKARTA PASCA REFORMASI 1998**



TESIS

Diajukan kepada Minat Studi Kajian Konflik dan Perdamaian Pascasarjana S-2
Ilmu Teologi Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Master of Science (M.Si)

oleh:

Ade Irman Susanto

NIM: 54110004

**Minat Studi Kajian Konflik dan Perdamaian
Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

Pemetaan Risiko Bencana Konflik Di Kota Surakarta Pasca Reformasi 1998

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Ade Irman Susanto (54110004)

Dalam ujian Tesis Minat Studi Kajian Konflik dan Perdamaian, Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi Universitas Kristen Duta Wacana untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada hari kamis, 17 Januari 2013.

Pembimbing 1


Farsijana Adeney-Risakotta, PhD

Pembimbing 2


Dra. Endah Setyowati, M.Si., M.A.,

Penguji:

1. Dr. Ing. Ir. Paulus Bawole, MIP
2. Farsijana Adeney-Risakotta, PhD
3. Dra. Endah Setyowati, M.Si., M.A.,

Tandatangan





Disahkan oleh:

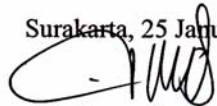

Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS., Ph.D.
Kaprodi Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ade Irman Susanto (54110004), menyatakan bahwa tesis yang berjudul **Pemetaan Risiko Bencana Konflik Di Kota Surakarta Pasca Reformasi 1998**, adalah hasil karya saya sendiri dan setiap tulisan orang lain yang saya gunakan untuk penulisan tesis ini telah saya sertai dengan catatan referensi yang jelas.

Apabila di kemudian hari terbukti, bahwa tesis tersebut merupakan salinan dari karya orang lain dan melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia melepaskan gelar kesarjanaan saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Surakarta, 25 Januari 2013



Ade Irman Susanto.



PERSEMBAHAN

*Goresan tinta kecil ini penulis persembahkan kepada:
- Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik, serta membimbingku, setiap tetes keringatmu tak akan pernah mampu kubalas dengan apapun, dan setiap detik waktu penyelesaian karya ini merupakan hasil getaran do'amu, semoga cinta dan perlindungan Allah selalu menyertaimu.*

- Istriku Tersayang, Titis Sunanti atas setiap pancaran semangat dan telah menjadi penyemangat dalam setiap langkah penyelesaian karya ini.*
- Anak-anakku tercinta, Adnan, Raya dan Farees anakku yang baru lahir yang selalu membuatku tersenyum dan tertawa dalam menulis karya ini.*
- Dan dari setiap keberhasilan dalam penyelesaian karya ini merupakan wujud kebanggaan diriku untuk sebuah Almamaterku.*

MOTTO

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu.

(Q.S. Al-Hujurat: 13)

*Ingatlah, Aku berpesan:
Agar kalian berbuat baik terhadap perempuan
karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan
di antara kalian,
padahal sedikit pun kalian tidak berhak memperlakukan mereka,
kecuali untuk kebaikan itu
(Hadits Riwayat at-Turmudzi)*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah membentangkan cakrawala keimanan kepada kita sebagai *'abdillah* untuk dijadikan pegangan dalam meraih tujuan hidup yang hakiki. Sholawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi *akhirul zaman*, Muhammad SAW atas ajaran dan bimbingannya lah kita bisa mengerti arti kehidupan ini.

Puja dan puji syukur, Tesis yang berjudul **Pemetaan Risiko Bencana Konflik Di Kota Surakarta Pasca Reformasi 1998**, telah selesai penulis susun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Master of Science (M.Si) Dalam Minat Studi Kajian Konflik dan Perdamaian, Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Dalam tesis yang sederhana ini, penulis selesaikan dalam waktu yang cukup panjang dengan berbagai suka dan duka. Banyak uluran tangan yang penulis terima selama belajar dan penyusunan tesis ini, oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Kaprodi Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS., Ph.D. yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan tesis ini
2. Ibu Farsijana Adeney-Risakotta. PhD dan Ibu Dra. Endah Setyowati, M.Si., M.A., dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan yang sangat berarti kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
3. Para dosen dan Staff pengajar dilingkungan kampus UKDW tercinta, khususnya Minat Studi Kajian Konflik dan Perdamaian, Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi Universitas Kristen Duta Wacana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, beliau-beliaulah yang telah memberikan bekal yang berarti berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu mendapatkan pencerahan.

4. Bapak dan Ibu tersayang, terima kasih atas segala dukungan, untaian do'a dan deraian air matanya, penulis sadar bahwa karya kecil ini tentu bukan balasan yang sepadan, namun dengan karya kecil ini semoga bisa menjadi tanda *ta'zhim* ananda.
5. Istri dan anak-anakku yang telah banyak menemani dan menyemangati dalam penyelesaian tesis ini, dari keduanya penulis banyak belajar memaknai kerasnya kehidupan ini.
6. Semua teman-temanku seperjuangan di kelas pasca sarja perdamaian dan transformasi konflik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, kepada kalian penulis banyak belajar.
7. Teman-teman di Kota Sala yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, kepada kalian penulis banyak belajar.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini, hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis persembahkan, semoga bisa menjadi catatan tersendiri.

Akhirnya penulis sadar bahwa tesis ini hanyalah karya kecil yang penuh dengan ketidaksempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk baiknya karya ini, kritik, saran dan masukan sangat penulis harapkan. Namun betapa kecil dan ketidaksempurnaannya tesis ini, penulis berharap semoga memberikan manfaat kepada kita semua, Amin.

Yogyakarta, Januari 2012
Penulis

Pemetaan Risiko Bencana Konflik Di Kota Surakarta Pasca Reformasi 1998

ABSTRAK

Fenomena menarik di masyarakat kota Surakarta adalah masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan tidak menyadari bahwa daerahnya memiliki risiko bencana sosial. Risiko bencana sosial berupa konflik kekerasan. Sehingga konflik kekerasan diselesaikan secara sporadis, temporal dan berdasarkan kecenderungan yang ada di masyarakat. Akibatnya adalah konflik kekerasan terus berulang. Pertanyaan penting untuk dapat mencegah bencana sosial terjadi kembali adalah “Bagaimana pemetaan risiko bencana sosial dapat menjelaskan ancaman keberagaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat kota Surakarta dalam mencegah konflik kekerasan yang berpotensi akan terjadi?”

Berangkat dari pertanyaan tersebut, menurut penulis kajian dan analisis terhadap risiko bencana sosial yang akan dihadapi masyarakat kota Surakarta menjadi hal yang penting. Paling tidak dengan mengetahui daerah-daerah yang memiliki risiko bencana sosial yang tinggi dapat di ketahui, dipahami dan dijadikan prioritas dalam kegiatan-kegiatan transformasi konflik.

Untuk melakukan kajian dan analisis penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Yakni melakukan pemetaan risiko bencana sosial dengan mengkaji ancaman, kerentanan dan kapasitas yang ada di masyarakat kota Surakarta. Hasil dari pengumpulan data selanjutnya di analisis dan direfleksikan dengan metode analisis pengurangan resiko bencana berdasarkan penelitian pustaka.

Berdasarkan kajian analisis pengurangan resiko bencana bahwa kota Surakarta dapat dipetakan risiko bencana sosial yang akan dihadapi baik dengan skala risiko tinggi, sedang dan rendah. Daerah-daerah yang memiliki risiko bencana sosial tinggi berada di kelurahan Joyosuran, Semangi, Sangkrah, Pasar Kliwon, Gendekan, Pajang, Tipes, Joyontakan dan Keprabon. Berdasarkan kajian dan analisis tersebut maka menurut penulis, upaya membangun budaya toleransi aktif, menghormati harus di kembangkan dengan pendidikan perdamaian, membangun kelompok-kelompok fungsi yang lintas etnis dan agama dan melatih masyarakat dalam melakukan mediasi terhadap konflik.

Kata Kunci: Bencana sosial, pengurangan resiko bencana sosial, konflik kekerasan, keberagaman, ancaman, kerentanan, kapasitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Perumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Telaah Pustaka	7
1.6.1 Definisi Konseptual.....	10
1.6.1.1 Konflik dan Kekerasan.....	10
1.6.1.2 Perdamaian dan Transformasi konflik.....	13
1.6.1.3 Bencana Sosial.....	14
1.6.1.4 Pengurangan Risiko Bencana.....	16
1.7 Kerangka Berfikir	19
1.8 Metodologi Penelitian	20
1.8.1 Jenis Penelitian.....	20
1.8.2 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	20
1.8.3 Sasaran Penelitian.....	22
1.8.4 Teknik Analisis.....	22
1.8.5 Validitas Data.....	23

BAB II: KEBERAGAMAN KOTA SURAKARTA	
2.1 Profil Kota Surakarta	25
2.2 Keberagaman di Surakarata	33
BAB III: ANCAMAN, KERENTANAN DAN KAPASITAS DI KOTA SURAKARTA	
1.1 Ancaman/Bahaya (<i>Hazard</i>)	38
1.1.1 Rangkaian Kejadian Konflik Kekerasan	39
1.1.1.1 Sebelum Kemerdekaan Indonesia	39
1.1.1.2 Masa Orde lama dan Orde Baru	41
1.1.1.3 Masa Reformasi	45
1.1.2 Peta Ancaman	51
1.2 Kerentanan	52
1.2.1 Kerentanan dalam kemiskinan	64
1.2.2 Kerentanan dalam Wilayah Kumuh	65
1.2.3 Kerentanan dalam kepadatan penduduk	66
BAB IV: PEMETAAN RISIKO BENCANA SOSIAL DI KOTA SURAKARTA	
4.1 Kapasitas Kota Surakarta	68
4.1.1 Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam membangun perdamaian	68
4.1.2 Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik	73
4.2 Pemetaan Risiko Bencana Sosial	79
BAB V: KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Rekomendasi	88
DAFTAR PUSAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Administratif Kota Surakarta.....	25
Gambar III.1 Peta bencana sosial pasca orde baru dan orde lama.....	44
Gambar III.2 Peta bencana sosial pasca Reformasi.....	50
Gambar III.3 Peta bencana sosial masa Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi.....	52
Gambar III.4 Peta Penduduk Miskin Kota Surakarta.....	64
Gambar III.5 Peta wilayah Kumuh Kota Surakarta.....	65
Gambar III.6 Peta Kepadatan Penduduk Kota Surakarta.....	66
Gambar IV.1 Peta Keamanan Kota Surakarta.....	73
Gambar IV.2 Peta Tingkat Risiko Bencana Konflik di Kota Surakarta.....	85



UKDW

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Daftar Kecamatan dan Jumlah Penduduk Kota Surakarta	26
Tabel II.2 Daftar Penganut agama di kota Surakarta	37
Tabel III.1 Kasus-kasus Konflik di Solo Raya bulan Mei-Juni 2009	46
Tabel IV.1 Pemetaan Risiko Bencana Sosial.....	81
Tabel V.1 Usulan Model Pendekatan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana Sosial.....	90

© UKDWN

DAFTAR SINGKATAN

BGM	Bawah Garis Merah
BTI	Barisan Tani Indonesia
Dalmas	Pengendali Massa
DKI	Daerah Khusus Istimewa
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FAM	Front Anti Marah
FKAJ	Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah
FKAM	Forum Komunikasi Antar Masjid
FKPI	Forum Kemanusiaan Dan Persaudaraan Indonesia
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
FORKUIS	Forum Komunikasi Umat Islam Surakarta
FPBI	Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia
FPIS	Front Pemuda Islam Surakarta
FPLAG	Forum Perdamaian Lintas Agama Dan Golongan
FSHKB	Forum Suara Hati Kebersamaan Bangsa
G30S/PKI	Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia
Ha	Hektar
IFC	Interfaith Community
IIRR	International Institute Of Rural Reconstruction
IMB	Ijin Mendirikan Bangunan
JI	Jamaah Islamiyah
JMS	Jamaah Masjid Surakarta
Jokowi	Joko Widodo
KH	Kyai Haji
KND	Komite Nasional Daerah
KPPI	Kesatuan Komando Pemuda Islam
KPU	Komisi Pemilihan Umum
LDII	Lembaga Dakwah Islam Indonesia
LPMK	Lembaga Pengembangan Masyarakat Kelurahan
LPTP	Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LUIS	Laskar Umat Islam Surakarta
MCK	Mandi Cuci Kakus
MMI	Majelis Mujahidin Indonesia
MPBI	Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
MTA	Majelis Tafsir Alquran
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NGO	<i>Non Government Organization</i>

NU	Nahdlatul Ulama
PANGESTU	Ngesti Tunggal
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
PDRA	Participatory Disaster Risk Assessment
PKL	Pedangan Kaki Lima
RRI	Radio Republik Indonesia
RSI	Rumah Sakit Islam
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SARA	Suku, Ras, Agama Dan Golongan
SDI	Serikat Dagang Islam
SGO	Sekolah Guru Olahraga
SI	Serikat Islam
SK	Surat Keputusan
SR	Serikat Rakyat
STII	Serikat Tani Islam Indonesia
SUBUD	Satu Budi
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
UNISDR	The United Nations Office For Disaster Risk Reduction
UU	Undang-Undang
YBKS	Yayasan Bakti Kesejahteraan Sosial



Pemetaan Risiko Bencana Konflik Di Kota Surakarta Pasca Reformasi 1998

ABSTRAK

Fenomena menarik di masyarakat kota Surakarta adalah masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan tidak menyadari bahwa daerahnya memiliki risiko bencana sosial. Risiko bencana sosial berupa konflik kekerasan. Sehingga konflik kekerasan diselesaikan secara sporadis, temporal dan berdasarkan kecendrungan yang ada di masyarakat. Akibatnya adalah konflik kekerasan terus berulang. Pertanyaan penting untuk dapat mencegah bencana sosial terjadi kembali adalah “Bagaimana pemetaan risiko bencana sosial dapat menjelaskan ancaman keberagaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat kota Surakarta dalam mencegah konflik kekerasan yang berpotensi akan terjadi?”

Berangkat dari pertanyaan tersebut, menurut penulis kajian dan analisis terhadap risiko bencana sosial yang akan dihadapi masyarakat kota Surakarta menjadi hal yang penting. Paling tidak dengan mengetahui daerah-daerah yang memiliki risiko bencana sosial yang tinggi dapat di ketahui, dipahami dan dijadikan prioritas dalam kegiatan-kegiatan transformasi konflik.

Untuk melakukan kajian dan analisis penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Yakni melakukan pemetaan risiko bencana sosial dengan mengkaji ancaman, kerentanan dan kapasitas yang ada di masyarakat kota Surakarta. Hasil dari pengumpulan data selanjutnya di analisis dan direfleksikan dengan metode analisis pengurangan resiko bencana berdasarkan penelitian pustaka.

Berdasarkan kajian analisis pengurangan resiko bencana bahwa kota Surakarta dapat dipetakan risiko bencana sosial yang akan dihadapi baik dengan skala risiko tinggi, sedang dan rendah. Daerah-daerah yang memiliki risiko bencana sosial tinggi berada di kelurahan Joyosuran, Semangi, Sangkrah, Pasar Kliwon, Gendekan, Pajang, Tipes, Joyontakan dan Keprabon. Berdasarkan kajian dan analisis tersebut maka menurut penulis, upaya membangun budaya toleransi aktif, menghormati harus di kembangkan dengan pendidikan perdamaian, membangun kelompok-kelompok fungsi yang lintas etnis dan agama dan melatih masyarakat dalam melakukan mediasi terhadap konflik.

Kata Kunci: Bencana sosial, pengurangan resiko bencana sosial, konflik kekerasan, keberagaman, ancaman, kerentanan, kapasitas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelesaian konflik kekerasan yang diselesaikan secara sporadis dan temporal serta berdasarkan kecenderungan yang ada di masyarakat tidak dapat mencegah terjadinya konflik kekerasan. Konflik yang terjadi berulang-ulang meskipun dengan pemicu yang berbeda-beda menunjukkan bahwa pencegahan konflik kekerasan tidak berjalan dengan baik. Pada kenyataannya, setiap daerah memiliki faktor-faktor penyebab konflik yang berbeda-beda baik dari ancaman konflik kekerasan itu sendiri, jenis kerentanan yang ada di masyarakat, dan kapasitas masyarakat untuk mengelola potensi-potensi konflik yang ada.

Semenjak didirikan pada tahun 1746 sampai sekarang, Kota Surakarta relatif sering dilanda konflik dan kerusuhan massal. Fakta sejarah memang memaparkan dengan jelas konflik yang menemani berkembangnya kota Surakarta. Sudarmono¹ memaparkan fakta dari sumber-sumber historiografi tradisional, *Geger Bedah* Kraton Kartasura tahun 1743 adalah wujud konflik kepentingan antara elit politik kolonial dan tradisional melawan kelompok Etnis Cina yang menguasai jaringan bisnis. Konflik kemudian merembet kepada konflik antara kelompok elit melawan kelas menengah. Sementara itu, pada saat yang sama, kepentingan politik dan ekonomi Belanda yang semakin mendalam di Kota Surakarta mengakibatkan lahirnya solidaritas yang menggunakan basis primordial antara kelompok-kelompok suku yang diam di Kota Surakarta. Peristiwa itu antara lain adalah tawuran antara Kong Sing Cina dengan Kong Jawa tahun 1911, atau kerusuhan akibat bentrok antara Serikat Islam (SI) dan Serikat Rakyat (SR) pada tahun 1923.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, status daerah kerajaan di Surakarta masih diakui oleh pemerintah dan disahkan secara resmi

¹ Sudarmono, "Peta Kerusuhan SARA di Surakarta", Makalah yang disampaikan pada Workshop memetakan kerawanan konflik di Kota Surakarta, oleh Forum Perdamaian Lintas Agama dan Golongan (FPLAG) di Yayasan Bakti Kesejahteraan Sosial (YBKS), Surakarta tgl 22 Oktober 2008

oleh presiden sebagai daerah istimewa. Pada tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan piagam Penetapan Presiden, Paku Buwana XII dan Mangkunegara VIII ditetapkan sebagai kepala Daerah Istimewa Surakarta. Sementara itu, golongan intelektual yang terdiri atas golongan pemuda pelajar dan golongan elit politik memberikan reaksi menentang usaha menghidupkan kembali pemerintahan kerajaan. Dalam usaha menentang pemerintah Swapraja ini, perubahan pemerintahan daerah Surakarta kaum Aristokrat merupakan penghalang terbentuknya suatu pemerintahan daerah di Surakarta. Melihat sikap Swapraja yang tidak dapat diajak bekerja sama, timbullah Kelompok Anti Swapraja di Surakarta yang mengakibatkan ketegangan-ketegangan sosial politik antara golongan ningrat (bangsawan) dengan golongan intelektual yang duduk dalam pemerintahan daerah Surakarta. Gerakan Anti Swapraja mulai terlihat ketika adanya berbagai peristiwa pada Oktober 1945 diantaranya terjadi penganiayaan terhadap seorang pangeran adinda Sri Mangkunegara VIII oleh beberapa orang dari anggota gerakan anti Swapraja dan aksi coret-coret tembok Supit Uring Kraton Kasunanan Surakarta.²

Pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, terutama pasca G30S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia), pergolakan politik di Surakarta masih memanas. Pada tanggal 6 November 1966, sejumlah massa melakukan pengrusakan toko-toko milik Etnis Cina di kawasan Nonongan dan Mangkuyudan. Peristiwa itu dipicu oleh rasa ketidakpuasan terhadap etnis Cina karena mendukung G30S/PKI. Pada bulan April 1971 amuk massa dengan identitas etnis meletus di Kota Surakarta. Kali ini dipicu oleh insiden kecil antara tukang becak dengan seorang pemuda etnis Arab. Sebagai akibatnya berbagai bangunan (rumah, toko, perkantoran) milik Etnis Arab dirusak dan dibakar massa. Tidak hanya itu berbagai bangunan milik etnis Cina pun turut dirusak dan dihancurkan.³

Pada tanggal 19 November 1980 amuk massa berbau etnis terulang kembali. Dalam sejarah kota Surakarta, peristiwa amuk massa berbau etnis

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

dipicu oleh insiden kecil, serempetan sepeda antara siswa Sekolah Guru Olahraga (SGO) dengan seorang pemuda etnis Cina yang akhirnya meluas menjadi kerusuhan etnis. Berbagai bangunan seperti rumah, toko dan kantor yang terletak di sepanjang Kota Surakarta dibakar massa. Amuk massa berbau etnis kembali terulang pada tanggal 14-15 Mei 1998, tetapi kerusuhan itu kemudian berkembang menjadi kerusuhan menentang kekuasaan, yaitu meminta Suharto turun sebagai presiden. Peristiwa menentang kekuasaan terjadi pada tanggal 13 Desember 1998. Faktor pemicu peristiwa itu bermula dari pembubaran *trek-trekan* (kebut-kebutan) di sepanjang Jl. Urip Sumoharjo oleh pasukan Pengendali Massa (Dalmas). Pembubaran secara represif aparat itu dipandang sebagai arogansi kekuasaan yang sudah saatnya ditinggalkan, rumah Kapolwil menjadi sasaran amuk massa rusak berat.⁴

Peristiwa kerusuhan menentang arogansi kekuasaan kembali terjadi pada tanggal 20 Oktober 1999 atau lebih dikenal dengan Rabu Kelabu karena pembakaran massa kantor-kantor pemerintah kota Surakarta terjadi pada hari Rabu. Awal dari peristiwa ini adalah rasa kecewa yang diawali oleh massa PDI Perjuangan karena Megawati tidak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-4. Sasaran kemarahan massa adalah kompleks pemerintahan Balai kota Surakarta. Kompleks pemerintahan itu dibakar massa hingga rata dengan tanah. Selain itu, berbagai fasilitas umum yang sebagian menjadi milik pemerintah dirusak dan dibakar massa.

Kejadian-kejadian konflik kekerasan di atas menggambarkan bahwa konflik kekerasan terus berulang. Di samping kerusuhan dalam skala besar masih terdapat kerusuhan lainnya dalam skala yang lebih kecil, misalnya konflik antara laskar-laskar Islam di Surakarta dengan preman (2002), yang berulang pada tahun 2004 dan 2008. Konflik antara pedagang Jawa dengan pedagang Cina serta konflik antar kekuatan politik.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ Menurut catatan yang dikumpulkan dari pengamatan penulis, kasus terakhir terjadi pada bulan Maret 2008 konflik antara Laskar Islam Surakarta yang terdiri dari Laskar Hisbullah, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) bertrok dengan Geng Gondez. Bertrokan ini mengakibatkan pimpinan geng Gondez bernama Kipli mati. Bertrokan ini

Surakarta, yang juga disebut Sala dan dibaca : Solo, adalah nama sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di Indonesia, Surakarta merupakan kota peringkat ke sepuluh terbesar setelah Yogyakarta. Kota ini dulu juga menjadi tempat kedudukan residen yang membawahi Karesidenan Surakarta di masa awal kemerdekaan. Posisi ini sekarang telah dihapuskan dan menjadi daerah pembantu Gubernur Kota Surakarta. Kota ini memiliki semboyan *Berseri* yang merupakan akronim dari Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah, selain juga slogan pariwisata *Sala the Spirit of Java* yang diharapkan mampu membangun citra kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa dengan masyarakat suku Jawa yang paling banyak menjadi penduduk Surakarta. Sekalipun demikian, tingkat keragaman masyarakat cukup tinggi terlihat dari latar belakang dari suku-suku yang hidup di Surakarta yaitu Sunda, Tionghoa, Arab, Madura, Nias, Aceh dan suku-suku pendatang lainnya. Dari segi agama, masyarakat Surakarta memeluk agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan aliran kepercayaan.

Keragaman memiliki dua sisi, yang pertama adalah kekayaan budaya, dan yang kedua adalah rawannya potensi gesekan yang lahir dari interaksi antarbudaya dalam sebuah kota. Kegagalan berkoeksistensi antaretnik merupakan potensi konflik yang mengancam. Beberapa faktor yang kerap memicu konflik di surakarta adalah perselisihan dua pihak yang berbeda etnis dan berbeda agama sering menjadi pemicu ketegangan-ketengangan di masyarakat dan konflik dan kerusuhan.

Surakarta juga sempat mendapat predikat kota teroris. Hal ini berkaitan dengan aktifitas beberapa elemen yang memiliki afiliasi dengan Islam radikal seperti adanya Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Majelis Tafsir Alquran (MTA) dan laskar laskar Islam lainnya. Stigma ini juga juga terkait dengan keberadaan Abu Bakar Baasyir yang bertempat tinggal di Surakarta yang diindikasikan memiliki hubungan dengan Jamaah Islamiyah (JI).⁶ Zainudin Fanani dalam bukunya yang berjudul

disebabkan intrik dari kedua belah pihak. Laskar Islam tidak menginginkan adanya orang mabuk di tempat umum, sedangkan Geng Gondez justru sebaliknya.

⁶ Lihat Zainudin Fanani, *Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial* (Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, 2000) h. 5

"*Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial*"⁷ berusaha memetakan gerakan radikal di Surakarta. Hasil penelitiannya menyebutkan beberapa organisasi massa Islam yang dikategorikan radikal di Surakarta antara lain MMI, MTA, FPIS, Laskar Jundullah, Hisbullah dan Forum Komunikasi Antar Masjid (FKAM).⁸

Menurut pengamatan peneliti sebagai warga kota Surakarta, perhatian pemerintah kota dan juga aparat kepolisian dirasakan masih lemah. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus konflik kekerasan di Surakarta sesudah masa reformasi. Penyelesaian konfliknya juga masih pada taraf penyelesaian masalah hukum kriminal sebaliknya pencegahan, analisis akar masalah, resolusi konflik yang menyebabkan dendam yang ada pada korban dan potensi konflik serupa di masa yang akan datang tidak terselesaikan.

Dengan demikian konflik yang berubah menjadi kerusuhan dan bencana sosial tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah kota, kepolisian dan masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap fenomena konflik datang secara periodik antara 15 sampai dengan 20 tahun seperti bencana konflik pada tahun 2012, 1998, 1971 dan tahun 1966. Bencana sosial yang terus menerus berulang dapat disebabkan karena pemerintah kota surakarta dan masyarakat belum sepenuhnya membuat program-program pemeliharaan perdamaian yang merespons fenomena kekerasan di atas, sehingga masyarakat dan aparat pemerintah bergerak pada permasalahan kasus-per kasus saja.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan ancaman bencana sosial masa lalu yang ada di Kota Surakarta memiliki penyebab yang kompleks akibat dari transisi kekuasaan politik seperti pada tahun 1743, masa penjajahan, 1945, 1998 dan 1999, atau karena persaingan antar pelaku ekonomi seperti pada tahun 1911 dan 1923, trauma dan dendam yang terpendam di beberapa etnis seperti pada tahun 1966, 1971, 1980. Peristiwa ini terus menjadi ingatan komunal bahwa peralihan kekuasaan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

menjadikan kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan kembali dan etnis tertentu menjadi sasaran kerusuhan,

2. Masyarakat kota Surakarta dalam mengantisipasi dan mencegah Konflik kekerasan di tingkat kecamatan dan kelurahan masih kurang karena masyarakat tidak mengetahui bahwa daerahnya memiliki potensi bencana konflik.
3. Sudah ada upaya rekonsiliasi atas konflik yang pernah terjadi sampai pada rencana penyelesaian jangka panjang yaitu menuju transformasi konflik. Akan tetapi proses rekonsiliasi terfokus pada penyelesaian masalah konflik dan tidak dilanjutkan pada pencegahan dan transformasi konflik yaitu perubahan budaya penyelesaian konflik dengan kekerasan menjadi budaya penyelesaian konflik dengan dialog dan musyawarah.
4. Penyelesaian masalah bencana konflik yang pernah ada di kota Surakarta diselesaikan hanya berdasar isu-isu yang berkembang. Akibatnya penyelesaian konflik sebelumnya meninggalkan dendam yang potensial terhadap konflik kekerasan. Penyelesaian konflik bukan ditunjukkan sebagai upaya yang dilakukan pengurangan risiko bencana konflik dengan cara terintegrasi antara pembangunan dan hubungan masyarakat yang bernuansa preventif, mitigatif (pencegahan), kesiapsiagaan, dan ketangguhan masyarakat dalam mengantisipasi konflik kekerasan.

1.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah seperti di atas, peneliti memfokuskan pada masalah ketidakmampuan masyarakat dalam mengembangkan kapasitas pencegahan dan pengurangan potensi konflik kekerasan (*violence conflict*) yang ada di kota Surakarta. Sebagai langkah awal pengembangan kapasitas itu, maka diperlukan sebuah informasi yang memuat pemetaan ancaman, kerentanan, kapasitas lokal, dan risiko yang akan dihadapi yang dapat dikembangkan sebagai dasar kebijakan maupun implementasi pencegahan konflik dan pengembangan perdamaian di Kota Surakarta.

Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, “Bagaimana pemetaan risiko bencana sosial yang terjadi di kota Surakarta untuk menjelaskan ancaman keberagaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat kota Surakarta dalam mencegah konflik kekerasan yang potensial terjadi?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan tingkat risiko bencana sosial yang ada di Kota Surakarta meliputi pluralitas dalam masyarakat, kerentanan dan kapasitas dalam mencegah konflik yang potensi akan terjadi. Dengan mengetahui pemetaan risiko bencana sosial yang ada maka dapat diketahui daerah-daerah yang memiliki potensi bencana sosial (konflik kekerasan) sehingga dapat dijadikan prioritas kegiatan-kegiatan pencegahan bencana sosial.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dini akan risiko bencana sosial bagi masyarakat Surakarta sehingga dapat dilakukan pencegahan dan mitigasi bagi bencana sosial.
2. Memberikan strategi transformasi konflik yang berkelanjutan bagi masyarakat Surakarta meliputi level pengambil kebijakan dan level masyarakat.
3. Memberikan pembelajaran bersama tentang memetakan risiko bencana sosial.

1.6 Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mencoba untuk mengungkapkan persoalan konflik sosial keagamaan di kota Surakarta. Beberapa penelitian itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Hary Mulyadi, Abdullah Faisal dan Zainudin Fanani. Dalam laporan penelitiannya yang berjudul “*Runtuhnya Kraton Alit, Refleksi Kerusuhan Mei 1998*”, atas dukungan dari Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) tahun 1999, Hari Mulyadi, Sudarmono mengatakan

bahwa konflik yang ada di Surakarta merupakan konflik laten yang terus berulang-ulang. Hal ini dibuktikan dengan serentetan konflik yang terjadi sejak bergabungnya Kraton Kasunanan Surakarta dengan Negara Kesatuan RI pada tahun 1946. Konflik yang terjadi biasanya berjalan sangat cepat. Diawali dengan protes sebagai wujud ketidaksepakatan kemudian melakukan amuk massa seperti membakar, menjarah bahkan sampai membunuh. Hary Mulyadi menjelaskan bahwa fenomena itu berlaku bagi semua konflik di Surakarta mulai Geger Swapraja tahun 1946, Peristiwa G30S/PKI tahun 1965, Geger Encik tahun 1972 dan kerusuhan Mei tahun 1998. Faktor utama penyebab terjadinya konflik di Surakarta adalah faktor kesenjangan ekonomi dan politik. Isu yang dihembuskan seringkali mengkonfrontasikan antara Jawa dan Cina atau pribumi dan non pribumi.⁹

Dalam laporan penelitiannya yang berjudul “*Program Ketahanan Masyarakat Dan Pendidikan Damai Di Surakarta*”, Abdullah Faisal mengetengahkan fakta bahwa dengan adanya ketahanan masyarakat diharapkan akan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat masyarakat berketahanan terhadap konflik, meskipun ada provokasi dari luar hal tersebut dapat diatasi oleh kesiapan masyarakat. Beberapa faktor yang merupakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk menciptakan ketahanan dan perdamaian adalah: etnis (pembauran), agama (penghayatan, budi pekerti, dan toleransi), budaya adiluhur, pendidikan keluarga, sekolah dan pendidikan damai di masyarakat. Lebih jauh lagi Abdullah Faisal mengemukakan faktor pemisah sosial di kota Surakarta yaitu: adanya kesenjangan ekonomi, masalah SARA (suku, ras, agama dan golongan), kemiskinan, ketidakadilan sosial ekonomi, mudurnya nilai budaya dan ruang publik yang kurang.¹⁰

Zainudin Fanani dalam penelitiannya yang berjudul “*Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial*” yang kemudian diterbitkan oleh Universitas

⁹ Hary Mashudi *et.al* , *Runtuhnya Kraton Alit, Refleksi Kerusuhan Mei 1998*, Surakarta, LPTP, 1999.h.79

¹⁰ Abdullah Faisal *et.al.*, *Program Ketahanan Masyarakat Dan Pendidikan Damai Di Surakarta*, dalam *Jurnal Transformasi*, Pusat Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Surakarta, Vol I Juli 2007.h. 12

Muhammadiyah Surakarta Press tahun 2002 telah melakukan pemetaan gerakan keagamaan radikal yang ada di Surakarta antara lain Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Laskar Jundullah, Laskar hisbullah, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah (FKAJ). Menurut Fanani, radikalisme selama ini identik dengan cara kekerasan adalah hal itu tidak benar sebab terdapat variabel lain selain aksi dengan kekerasan yaitu berkaitan dengan tujuan dan cara pencapaiannya. Misalnya dalam hal lompatan pemikiran dalam melakukan perubahan-perubahan pemikiran di kalangan anak muda dan peraturan daerah sering kali tidak menggunakan kekerasan dalam setiap gerakannya, tetapi sebaliknya menggunakan pola yang lebih moderat.¹¹

Dalam laporan-laporan penelitian di atas menjelaskan bahwa konflik kekerasan timbul bukan hanya karena adanya provokasi dari pihak ketiga tetapi juga dari permasalahan di dalam masyarakat seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan, hilangnya budaya-budaya utama di daerah itu, hubungan dan interaksi etnis dan agama di masyarakat di kota Surakarta. Fenomena itu selalu memberikan peluang untuk terjadinya bencana sosial. Isu-isu dengan nuansa Jawa dan cina, pribumi dan non pribumi masih terus berulang seperti isu ini di turunkan terus dari generasi ke generasi berikutnya. Membuat masyarakat sangat mudah diprovokasi untuk melakukan konflik dan kerusuhan. Dengan kalimat lain daya imun masyarakat terhadap konflik kekerasan mulai tidak berdaya.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang disusun oleh penulis dalam bentuk tesis ini, maka laporan-laporan yang disusun oleh para peneliti tentang Kota Surakarta memberikan analisis terhadap penyebab perilaku kekerasan massa yang menggunakan identitas primordial atau pun politik dari berdirinya Kraton Surakarta hingga Reformasi 1998. Analisis-analisis maupun detail urutan kejadian setiap peristiwa kekerasan massa di Solo dari kumpulan penelitian itu memberikan pijakan bagi pengembangan upaya menemukan kapasitas lokal masyarakat Surakarta untuk mengembangkan kemampuan prevensi terhadap

¹¹ Zainudin Fanani, *et.al.*, *Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial*, Universitas Muhammadiyah Press (UMS), Surakarta, 2000 h.12

konflik maupun pengembangan kapasitas untuk berkoeksistensi dalam konteks masyarakat yang plural.

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Konflik dan Kekerasan

Seluruh masyarakat mengidealkan kondisi yang damai dan tentram. Mereka secara psikologis mengharapkan kehidupan yang harmoni, teratur dan tidak muncul konflik di masyarakat. Mereka dapat bekerja dengan rasa aman, meninggalkan keluarga di rumah tanpa ada rasa was-was dan ada jaminan dapat beribadah dengan tenang dan khusuk. Akan tetapi seringkali kondisi ini sangat berubah. Konflik dan ketegangan sering kali muncul dan mengancam kehidupan sehari-hari. Baik itu konflik antar kelompok, golongan maupun konflik antar agama.

Sekalipun demikian, konflik adalah gejala yang normal dan senantiasa hadir dalam relasi antar manusia, dan konflik merupakan pemicu sebuah perubahan karena masyarakat dan relasi antar manusia tidaklah statis melainkan selalu dinamis, beradaptasi, dan berubah.¹² Oleh karena itu konflik menjadi sesuatu yang wajar di kehidupan sosial. Akan tetapi ia akan menjadi tidak normal ketika konflik menjadi kekerasan. Oleh karena itu, di sini perlu didefinisikan tentang konflik dan kekerasan.

Pengertian konflik menurut Chris Mitchell adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.¹³ Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.¹⁴

Konflik ini terjadi jika dalam hubungan tersebut terjadinya suatu kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, serta kekuasaan yang

¹²John Paul Lederach, *Transformasi Konflik*, Terjemahan, PSPP UKDW, Yogyakarta, 2005, h.35

¹³Fisher dkk. *Mengelola Konflik, terjemahan*, British Council, Indonesia, 2000, h 4

¹⁴*Ibid.*, h 4

tidak seimbang. Kepentingan dan keinginan-keinginan yang tidak lagi harmonis akan membawa masalah dalam hubungan antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Penggambaran konflik ini didukung oleh pembahasan Simon Fisher dalam penjelasannya tentang teori Konflik Kebutuhan. Menurutnya, konflik berakar pada ketiadaan terpenuhinya kebutuhan dasar-fisik, mental dan sosial manusia.¹⁵

Istilah konflik berkekerasan dalam bahasa Inggris dihubungkan dengan kata *violence* yang berasal dari kata *vis* yang berarti daya dan kekuatan dan *latus* yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah sebagai sesuatu hal yang memberi sifat kekuatan, paksaan, tekanan dan desakan yang keras.¹⁶ Kata tersebut bersinonim dengan memaksa, melanggar, memperkosa, merampas dan mengancam. Ronald Audi mengartikan kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan untuk menghancurkan, perusakan yang sangat kejam dan ganas terhadap seseorang. Abdul Jalil mengatakan bahwa konflik kekerasan adalah gambaran perilaku yang bersifat terbuka dan menyerang yang disertai dengan kekuatan terhadap orang lain.¹⁷

Ada empat jenis konflik kekerasan yaitu pertama, kekerasan terbuka seperti penyerangan, pembakaran, pembunuhan dan perusakan yang dilakukan secara terang-terangan di depan umum. Kedua, kekerasan tertutup yaitu kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi seperti menakut-nakuti dan meneror. Ketiga, kekerasan pasif yaitu kekerasan yang dilakukan tidak ada perlindungan atas gangguan tertentu. Keempat, kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Kekerasan terbuka, kekerasan tertutup dan kekerasan pasif adalah tindak kekerasan yang sangat terlarang sebab hanya akan mengakibatkan kerugian pada orang lain sedangkan kekerasan pada jenis defensif dalam beberapa hal dapat dibenarkan.¹⁸ Dalam konteks masyarakat, konflik kekerasan kesemuanya tidak bisa dibenarkan. Tidak ada persoalan yang dapat

¹⁵ *Ibid.*, h 4

¹⁶ Humaidi Abdussalam dan Masnun Tahir, *Islam Dan Hubungan Antar Agama*, LKIS, Jogjakarta, 2007.h. 67

¹⁷ *Ibid* h. 70-72

¹⁸ *Ibid* h. 73

diselesaikan dengan kekerasan. Konflik sekecil apapun jika menggunakan penyelesaian dengan kekerasan hanya akan menambah rumitnya konflik.

Siklus konflik berawal dari adanya kepentingan yang terganggu dengan kepentingan yang lainnya. Kondisi ini akan mendistorsi nilai di masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti saling menghormati, toleransi, egalitarian, keseimbangan hidup dan musyawarah akan didistorsi sedemikian rupa sehingga yang muncul adalah permusuhan dan sikap saling membenci. Kondisi ini ketika terus berlangsung akan merusak relasi atau jaringan yang ada dalam masyarakat. Ketika jaringan dalam masyarakat rusak maka yang muncul adalah runtuhnya struktur yang ada di masyarakat. Rasa saling percaya, rasa aman dan pesaudaraan menjadi hilang tergantikan dengan rasa saling curiga, was-was dan permusuhan semakin menguat. Tahap berikutnya adalah distribusi sumberdaya dalam masyarakat akan hancur sehingga secara umum masyarakat sudah terjebak dalam lingkaran konflik yang akut.¹⁹ Kondisi ini sering kali diperkeruh dengan adanya dorongan dari luar seperti motif politik dan ekonomi.

Fisher²⁰ mengungkapkan tentang teori Hubungan Masyarakat yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Teori kebutuhan manusia, menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yakni fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Dari teori negosiasi, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang ketegangan konflik dari pihak-pihak yang bersitegang. Sasaran dari teori ini membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu. Memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka dan

¹⁹ Siklus konflik selalu dimulai dari kepentingan yang terganggu atau dipaksakan pada kelompok lain, kemudian merusak nilai yang ada, relasi yang terbangun, struktur dan alokasi distribusi. siklus itu berlaku pada setiap konflik kekerasan.

²⁰ *Ibid.*, h 8

melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

Teori identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Teori kesalahpahaman antarbudaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Setiap konflik yang terjadi tidak muncul secara tiba-tiba akan tetapi selalu berkaitan dengan isu, relasi, sub-sistem dan sistem.²¹ Membangun hubungan adalah inti perubahan sosial.²² Relasi adalah sentral. Sebagaimana jantung dalam tubuh, konflik mengalir dari dan kembali kepada relasi.²³ Dalam kaitan dengan kota Surakarta konflik-konflik yang muncul berkaitan dengan permasalahan sosial, budaya dan ekonomi yang ada di masyarakat. Isu-isu yang berkembang seperti orang Jawa-Cina, Pribumi-non pribumi, dan keagamaan selalu akan menguji kekuatan relasi antar masyarakat di dalam sistem pemerintahan dan budaya di kota Surakarta.

1.6.1.2 Perdamaian dan Transformasi konflik

Transformasi konflik²⁴ adalah menciptakan visi dan merespon pasang surut konflik sosial sebagai kesempatan yang diberikan oleh hidup demi terciptanya proses perubahan konstruktif yang mereduksi kekerasan dan mengembangkan keadilan dalam interaksi langsung dan dalam struktur-struktur sosial, serta merespon masalah kehidupan nyata dalam relasi antar manusia.

Transformasi konflik dalam pengembangan masyarakat memberikan pandangan ke depan yang jauh dan perubahan secara konstruktif. Dalam

²¹ John Paul Lederach, *Building Peace*, (Washington DC, US institute of peace press, 1999), h. 56

²² John Paul Lederach, *The Moral Imagination*, (New York: Oxford University Press, 2005). h.. 86

²³ John Paul Lederach, *Building Peace, op.cit.*,)bab 3

²⁴ *Ibid.*, . h. 23

pengembangan masyarakat hal yang paling cepat memberikan hasil adalah dengan mengidentifikasi masalah sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Dampak perubahan dari konflik dapat dianalisis dalam empat kategori yang umum, yakni kategori personal, relasional, struktur, dan kultural. Dimensi personal konflik merujuk pada perubahan yang berdampak mendalam dan diinginkan secara individual yang meliputi pribadi, dimensi kognitif, emosional, perseptual dan spiritual. Tujuan perubahan dalam transformasi konflik dalam dimensi ini adalah meminimalkan efek destruktif suatu konflik sosial dan memaksimalkan potensi bagi pertumbuhan dan kebaikan pribadi sebagai individu manusia pada arah fisik, emosional, intelektual, dan spiritual.

Banyak orang memahami perdamaian sebagai keadaan tanpa perang, tidak adanya perang tentu saja penting tetapi keadaan ini hanyalah langkah awal ke arah cita-cita yang lebih sempurna. Perdamaian adalah suatu proses, suatu pertarungan multi dimensional yang tidak pernah berakhir dalam usaha untuk mengubah kekerasan. Definisi perdamaian adalah sebagai menjalin hubungan antar individu, kelompok dan lembaga yang menghargai keragaman nilai dan mendorong pengembangan potensi manusia secara utuh.²⁶ Membangun hubungan adalah inti perubahan sosial.²⁷

1.6.1.3 Bencana Sosial

Berdasarkan penyebab bahayanya, bencana dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu bencana alam, bencana sosial dan bencana campuran. Bencana alam disebabkan oleh kejadian-kejadian alamiah seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan angin topan. Bencana sosial atau bencana buatan manusia, yaitu hasil dari tindakan langsung maupun tidak langsung manusia seperti perang, konflik sosial, terorisme, tawuran antar kelompok dan kegagalan teknologi.

²⁵ Rudito dan Famiola, *Sosial Mapping-Metode Pemetaan Sosial*, Rekayasa sains Bandung, Bandung, 2008. h 37

²⁶ Fisher et.al. *Mengelola Konflik, terjemahan*, British Council, Indonesia, 2000, h 13

²⁷ John Paul Lederach, *The Moral Imagination*, (New York: Oxford University Press,2005). h 86

Bencana dapat terjadi karena alam dan manusia sekaligus yang dikenal sebagai bencana campuran/ kompleks, seperti banjir dan kekeringan.²⁸

Untuk menentukan apakah kondisi itu disebut bencana membutuhkan pengertian yang bersama untuk menjadi kaca mata yang sama dalam menanggapi bencana yang terjadi. Bencana yang ada di dalam Undang-undang Republik Indonesia no 24 memiliki pengertian bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.²⁹

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.³⁰ Pengertian bencana di atas adalah pengertian pegangan pemerintah Republik Indonesia dalam melihat bencana.

Terdapat pengertian yang lain dari beberapa *Non Government Organization* (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Seperti yayasan Idep mengembangkan pengertian bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat sehingga menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang meluas pada kehidupan manusia baik dari segi materi, ekonomi maupun lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi menggunakan sumberdaya yang mereka miliki.³¹ Bencana menurut organisasi IIRR dan Cordaid adalah gangguan besar dari fungsi masyarakat yang mengakibatkan banyaknya kehilangan nyawa, material maupun kerusakan lingkungan, melebihi kemampuan yang dimiliki masyarakat yang terkena.

²⁸ Yayasan Idep, *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Bali*, Yayasan Idep, 2007 h.31

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

³⁰ *Ibid.*

³¹ Yayasan Idep, *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Bali*, Yayasan Idep, 2007. h 30

Konflik-konflik yang terjadi di kota Surakarta atau di tempat lainnya berakhir pada kekerasan dan telah menimbulkan kepada kerugian material (seperti kerusakan dan pembakaran rumah, toko dan pasar) dan juga kehilangan nyawa. Konflik-konflik yang diikuti oleh kekerasan (konflik kekerasan) merupakan bencana sosial seperti dari sejarah konflik di kota Surakarta.

1.6.1.4 Pengurangan Risiko Bencana

Membangun masyarakat damai tidak hanya dapat diwujudkan dengan pendekatan penyelesaian konflik akan tetapi juga membangun masyarakat yang dapat melakukan pencegahan, mengantisipasi dan mengurangi dampak dari konflik kekerasan. Dalam konsep bencana, konflik kekerasan termasuk dalam bencana sosial. Bencana sosial dapat dilakukan pencegahan dan kesiapsiagaan oleh masyarakat agar dampak dari bencana sosial itu tidak menimpa masyarakat atau dapat mengurangi dampak bencana sosial.

Konflik kekerasan atau bencana sosial dapat dikurangi dampaknya dengan melakukan pengurangan total risiko (*total risk reduction*). Pengurangan risiko bencana sosial adalah penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan manajemen bencana sosial (*disaster management*), manajemen bencana sosial merupakan kegiatan yang meliputi aspek perencanaan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. Langkah siklus penanggulangan bencana sosial perlu diterapkan secara utuh.

Prinsip kehati-hatian mulai dicermati setiap bagian kegiatan yang berpotensi menjadi ancaman (*hazard*) terhadap keberadaan aset penghidupan dan jiwa manusia. Ancaman tersebut perlahan-lahan maupun tiba-tiba akan berpotensi menjadi bencana (*disaster*), sehingga menyebabkan hilangnya harta benda dan lingkungan. Kejadian ini terjadi diluar kemampuan adaptasi masyarakat dengan sumberdayanya. Berkenaan dengan itu maka perlu dipahami potensi risiko (*risk*) yang muncul yaitu besarnya kerugian atau kemungkinan hilangnya (jiwa, korban, kerusakan dan kerugian ekonomi) yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu.

Risiko biasanya dihitung secara matematis, merupakan probabilitas dari dampak atau konsekuensi suatu bahaya/ancaman. Jika potensi risiko pada pelaksanaan kegiatan jauh lebih besar dari manfaatnya maka kehati-hatian perlu dilipatgandakan. Upaya mengurangi kerentanan (*vulnerability*) yang melekat, yaitu sekumpulan kondisi yang mengarah dan menimbulkan konsekuensi (fisik, sosial, ekonomi dan perilaku) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

Dari pengertian-pengertian di atas, bencana merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia dengan kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana. Singkatnya ketika ancaman berdampak merugikan manusia dan lingkungan, dan tidak adanya kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya maka peristiwa itu disebut dengan bencana. Terdapat formula untuk menakar besaran bencana yang akan datang dan menjadi risiko yang perlu dihitung untuk mempermudah pemahaman tentang bencana dan risikonya yaitu:³²

$$\text{Risiko Bencana} = \frac{\text{Ancaman Bahaya} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kemampuan}}$$

Ancaman biasanya dikenal orang dengan istilah bencana. Begitupun ancaman, dapat disebut sebagai bencana ketika menyerang masyarakat, yang tidak dapat mengatasi akibatnya.³³ Ancaman atau bahaya adalah suatu fenomena, substans, aktivitas manusia atau kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak-dampak kesehatan lain, kerusakan harta benda, hilangnya penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.³⁴ Ancaman dapat dibagi sebagai berikut³⁵:

- Semua yang disebabkan oleh alam: gempa bumi, kekeringan, banjir, dan longsor.
- Semua yang disebabkan kekerasan: perang, konflik senjata, dan serangan fisik.

³² IIRR, Cordaid. *Membangun Ketahanan Masyarakat*. Terjemahan. Filipina, 2007. h.39

³³ IIRR, Cordaid.*op.cit.*, . h.101

³⁴ ADRRN, UNISDR,, . h.5

³⁵ IIRR, Cordaid.*op.cit.*, . h.101

- Semua yang disebabkan kerusakan: penurunan kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum lainnya.
- Semua yang disebabkan oleh kegagalan teknologi: kegagalan teknologi, tumpahan minyak, ledakan pabrik, kebakaran, kebocoran gas, kegagalan transportasi.

Bahaya dapat berbentuk tunggal, berurutan atau gabungan antara asal dan dampak mereka. Setiap bahaya dicirikan oleh lokasi, frekuensi dan probabilitasnya. Jika melihat dari UU No 24 tahun 2007, ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana.³⁶

Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.³⁷ Dari pengertian UNISDR (*The United Nations Office for Disaster Risk Reduction*) kerentanan adalah karakteristik dan kondisi sebuah komunitas, sistem atau aset yang membuatnya cenderung terkena dampak merusak yang diakibatkan ancaman bahaya,³⁸

Kemampuan atau kapasitas³⁹ adalah penguasaan sumberdaya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, sehingga memungkinkan untuk mengurangi tingkat risiko bencana dengan cara mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Dari UNISDR, kerentanan adalah gabungan antara semua kekuatan, ciri yang melekat dan sumber daya yang tersedia dalam sebuah komunitas, masyarakat atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati.⁴⁰ Kapasitas dapat mencakup cara-cara fisik,

³⁶ UU no 24 tahun 2007 pasal 1 ayat 13

³⁷ IIRR, Cordaid.*op.cit.*, h. 19

³⁸ ADRRN, UNISDR,, . h.20

³⁹ IIRR, Cordaid.*op.cit.*, . h.19

⁴⁰ ADRRN, UNISDR,, . h.20

kelembagaan, sosial atau ekonomi serta karakteristik ketrampilan pribadi atau kolektif seperti misalnya, kepemimpinan dan manajemen.

1.7 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini untuk dapat memetakan daerah-daerah potensi bencana sosial akan menggunakan kerangka berfikir pengurangan risiko bencana. Dasar Keselamatan dan Standar Pengurangan Risiko Bencana Sosial adalah membangun ketahanan/ketangguhan masyarakat, mengenali harga diri yang mendasar dan kesamaan serta hak yang melekat di seluruh umat manusia yaitu dasar keadilan dan perdamaian di dunia. Memahami hal tersebut di atas adalah dasar keselamatan.⁴¹ Membangun ketahanan masyarakat berarti memperkuat dasar keselamatan. Memastikan bahwa masyarakat memahami hak yang paling mendasar, terutama bagi masyarakat yang rentan, mulai dari hak untuk hidup hingga hak mendapatkan sumber daya. Sebagai contoh penyampaian yang efektif dari pelayanan dasar seperti imunisasi melawan penyakit atau kemudahan untuk mendapatkan makanan pokok adalah hal dasar untuk meningkatkan ketahanan alami. Ketiadaan atau kekurangan hal tersebut di atas akan membuat masyarakat lemah dan mengakibatkan ketidakmampuan mengatasi ancaman.

Ketidakpedulian dan tidak menghargai hak azasi manusia sebagai dasar keselamatan telah mengakibatkan kehilangan rumah, kurang perhatian, terkena penyakit yang seharusnya dapat dicegah, kesulitan memperoleh pendidikan yang setara, penyalahgunaan dan ketidakefektifan sistem keadilan. Ketika ancaman datang, orang yang paling sedikit mendapat perlakuan hak azasi adalah yang paling lemah dan sulit untuk bertahan hidup sehingga ancaman menjadi bencana sosial. Membangun kemampuan masyarakat untuk mengurangi kerentanan terhadap ancaman merupakan elemen-elemen yang terdiri dari usaha-usaha pengurangan risiko bencana sosial.

Bencana sosial terjadi ketika dasar keselamatan lemah dan tidak adanya usaha-usaha pengurangan risikonya. Lebih jauh lagi, meskipun usaha-usaha

⁴¹ IIRR, Cordaid.*op.cit.*, . h.41

dilakukan agar semua orang mendapat perlakuan hak azasi yang sama dan meningkatkan dasar keselamatan, standar pengurangan risiko bencana sosial sangat penting untuk segera pulih dalam menghadapi setiap keadaan.

Pengurangan risiko bencana sosial merupakan kerangka kerja dan alat yang menentukan tingkat risiko dan menjelaskan standar untuk meningkatkan kemampuan dan mengurangi akibat ancaman pada elemen berisiko dan mencegah bencana sosial. Dikatakan kerangka kerja dan alat karena Pengurangan risiko bencana ini memberikan langkah-langkah dalam melakukan penilaian risiko yaitu terlebih dahulu mengkaji ancaman/bahaya, kerentanan dan kapasitas di suatu daerah dan dari hasil penilaian tersebut maka dapat dijadikan untuk mengukur kemungkinan risiko yang akan dihadapi.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini akan memetakan risiko bencana sosial yang akan dihadapi dengan melihat ancaman, kerentanan dan kapasitas yang ada di masyarakat. Setelah mengetahui tiga aspek tersebut akan dianalisis tingkat risiko bencana sosial di setiap lokasi sehingga akan didapati pemetaan risiko bencana sosial.

1.8.2 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kajian Risiko Bencana Partisipatif (*Participatory Disaster Risk Assessment/ PDRA*). Menurut Abarquez dan Murshed PDRA adalah:

*a process whereby all concerned parties collect and analyze disaster risks information, in order to make appropriate plans and implement concrete actions to reduce and/or eliminate disaster risks that will adversely affect their lives. It is both a dialogue and a negotiated process involving those at risk, authorities and other stakeholders.*⁴²

⁴² Imelda Abarquez and Zubair Murshed, Community-Based Disaster Risk Management, Thailand, ADPC, 2004 h. 8

Kajian risiko bencana secara partisipatif merupakan tahapan diagnostik untuk mengidentifikasi persepsi komunitas atas risiko, pemetaan bahaya kerentanan, kapasitas dan identifikasi risiko, evaluasi dan penilaian risiko serta potensi sumber daya yang tersedia dan mobilisasi sumberdaya dan hasil akhirnya dilaporkan bersama ke komunitas.⁴³ Menurut lembaga *International Institute of Rural Reconstruction* (IIRR) dan Cordaid, kajian risiko bencana secara partisipatif merupakan tahapan yang saling berhubungan antara kajian ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang ada di masyarakat serta analisis kajian bencana.⁴⁴

Untuk mendapatkan data-data penelitian akan dilakukan dengan cara:

- a. Studi dokumentasi, teknik yang dilakukan dalam penelaahan dan analisis serta interpretasi terhadap dokumen hasilnya dapat dijadikan sumber data. Data yang akan di jadikan data penelitian adalah data-data sekunder. Data ini untuk memperoleh data-data seperti jumlah penduduk, demografi, tingkat pendidikan dan sebagainya. Data ini di peroleh di pemerintahan kota Surakarta dan dinas-dinasnya.
- b. Observasi partisipatif, yakni peneliti sebagai pengamat dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang dialami masyarakat. Observasi, digunakan selama penelitian berlangsung untuk mencermati beragam fenomena. Data yang terkumpul melalui observasi diperoleh melalui sumber belajar yaitu cerita-cerita (*story telling*), kasus-kasus, pengalaman bencana sosial yang pernah dialami masyarakat.
- c. Wawancara merupakan teknik yang dilakukan peneliti untuk mengamati masyarakat melalui pengamatan data yang intensif dalam bentuk komunikasi vertikal dan sebagai proses interaksi peneliti dan sumber data yang dilakukan dengan efektif kepada responden yaitu tokoh agama, akademisi, aparatur pemerintahan kota, organisasi masyarakat.
- d. Wawancara merupakan teknik yang dilakukan peneliti untuk menamati masyarakat melalui pengamatan data intensif dalam bentuk komunikasi vertikal dan sebagai proses interaksi peneliti dan sumber data yang

⁴³ MPBI, GTZ., CBDRM for CAP Field Practitioner's Handbook, Jakarta, GTZ, h. 28

⁴⁴ IIRR, Cordaid, Membangun Ketahanan masyarakat, terjemahan, Pilipina, 2008 h. 68-69

dilakukan dengan efektif kepada responden yaitu tokoh agama, akademisi, aparat pemerintah kota, organisasi masyarakat dan keagamaan dan masyarakat akar rumput. Teknik ini digunakan sebagai alat pembantu utama mengobservasi responden.

- e. Penulisan penelitian yang dilakukan peneliti dengan berdiskusi dengan dua dosen pembimbing untuk menjadikan penelitian dan penulisannya sesuai dengan penelitian ilmiah.

1.8.3 Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini meliputi 5 Kecamatan di kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah..

1.8.4 Teknik Analisis

Teknik analisis menggunakan analisis risiko bencana sosial. Teknik ini akan memfokuskan bagaimana mengkonsolidasi hasil kajian ancaman, kerentanan dan kapasitas dan mengintegrasikan dari tiga aspek itu yang mungkin menjadi langkah-langkah pengurangan risiko bencana di kota Surakarta. Risiko akan tinggi jika ancaman tinggi, kerentanan tinggi di masyarakat dan kemampuan atau kapasitas masyarakat rendah. Risiko akan rendah jika ancaman menjadi rendah, kerentanan di masyarakat sedikit dan kemampuan masyarakat dalam bencana tersebut tinggi. Dengan demikian, ancaman dan kerentanan berbanding terbalik dengan kemampuan/kapasitas seperti dalam rumusan risiko bencana yang tertulis di halaman 17.

Ancaman atau bahaya adalah kejadian-kejadian, gejala atau kegiatan manusia yang berpotensi untuk menimbulkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial ekonomi atau kerusakan lingkungan. Bahaya dapat mencakup kondisi-kondisi laten yang bisa mewakili ancaman di masa depan dan dapat disebabkan oleh berbagai hal: alam misalnya geologis, hidrometeorologis dan biologis atau yang diakibatkan oleh proses-proses yang dilakukan manusia seperti kerusakan lingkungan dan bahaya teknologi. Bahaya dapat berbentuk tunggal, berurutan atau gabungan antara asal dan dampak mereka. Setiap bahaya

dicirikan oleh lokasi, frekuensi dan probabilitasnya. Pada penelitian ini ancaman akan di fokuskan pada kejadianbyang berpotensi kepada bencana sosial yaitu konflik kekerasan.

Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (acaman bahaya konflik kekerasan). Sementara itu, kemampuan atau kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, sehingga memungkinkan untuk mengurangi tingkat risiko bencana dengan cara mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Kapasitas dapat mencakup cara-cara fisik, kelembagaan, sosial atau ekonomi serta karakteristik ketrampilan pribadi atau kolektif seperti misalnya kepemimpinan dan manajemen.

Menurut Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) untuk melakukan Pemetaan risiko bencana ada beberapa langkah pelaksanaan yaitu:⁴⁵

- membuat profil daerah
- penilaian ancaman/bahaya
- penilaian kerentanan dan kemampuan (kapasitas)
- penilaian dan pemetaan risiko

1.8.5 Validitas Data

Uji kevalidan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu : *pertama*, triangulasi data dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mendapatkan fokus data yang sama. *Kedua*, informan review (*review informan*), laporan penelitian direview oleh informan, khususnya informan-informan kunci. Hal ini untuk mengetahui apakah yang ditulis oleh peneliti merupakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada atau tidak. Jika sesuai maka

⁴⁵ MPBI, GTZ., *CBDRM for CAP Field Practitioner's Handbook*, Jakarta, GTZ, h. 111

hal tersebut adalah sesuatu yang dapat disetujui oleh mereka, jika tidak maka data yang diperoleh peneliti harus dilengkapi lagi, tahapan ini dapat dilakukan dengan berdiskusi secara informal. Data-data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data-data dari wawancara, pengamatan dan kajian pustaka yang dilaksanakan sejak September 2008 sampai dengan September 2012.

© UKDW

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian mulai bab pertama sampai keempat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kota Surakarta memiliki kebudayaan Jawa dengan masyarakat suku Jawa yang paling banyak. Sekalipun demikian tingkat keragaman masyarakat cukup tinggi terlihat dari latar belakang dari suku-suku yang hidup di Surakarta yaitu Sunda, Tionghoa, Arab, Madura, Nias, Aceh dan suku-suku pendatang lainnya. Dari segi agama, masyarakat Surakarta memeluk agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan aliran kepercayaan. Keberagaman di kota Surakarta menjadi kekayaan budaya akan tetapi juga menjadi kerentanan konflik terutama apabila terjadi kepadatan penduduk, urbanisasi yang tidak terkendali dan tidak dapat beradaptasi dari penduduk luar sehingga menyebabkan ketegangan-ketegangan di masyarakat dan menjadi konflik secara massa, dan juga kesenjangan ekonomi dari suku-suku yang berbeda dari pribumi dan pendatang.
2. Ancaman konflik yang akan menjadi bencana sosial di kota Surakarta berawal pada kepentingan antara elit politik dan tradisional melawan kelompok etnis Tionghoa yang menguasai jaringan bisnis. Konflik ini kemudian merembet kepada konflik antara kelompok elit melawan kelas menengah dengan munculnya gerakan politik radikal dalam skala nasional di kota Surakarta. Konflik terus bergeser kepada isu etnis. Konflik melebar pada kalangan preman dengan laskar. Warisan konflik masa lalu masih terus di wariskan yaitu politik, ideologi, dan etnis.
3. Kerentanan yang akan menjadi bencana sosial adalah masalah sosial yang dihadapi di Surakarta di antaranya persoalan pengangguran, kemiskinan, urbanisasi, kekumuhan, ketersediaan ruang publik dan kesejahteraan

masyarakat. Kerentanan yang terjadi karena gesekan antar kelompok keagamaan, pengalihan masalah kekeringan spiritual ke konflik horizontal, segregasi (pengkotak-kotakan) sosial berdasar isu keagamaan, kesenjangan antara kesadaran moralitas dengan kesadaran hukum.

4. Kapasitas yang dimiliki kota Surakarta adalah adanya peran pemerintah daerah dalam membangun perdamaian berupa peranan pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi dalam pengentasan kemiskinan, menguatkan peran FKUB dan melakukan program ketahanan masyarakat dalam konflik oleh pemerintah kota Surakarta, memproses kasus-kasus kerusuhan secara hukum. Terdapat juga kapasitas yang dimiliki masyarakat dengan lembaga sosial dan kemasyarakatannya yaitu mengembangkan program-program perdamaian di kota Surakarta dengan pendidikan perdamaian, dan masih terdapat forum-forum perdamaian yang aktif dalam program perdamaian.
5. Daerah yang memiliki tingkat risiko konflik kekerasan cukup tinggi disebabkan ancaman dan kerentanan lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas yang dimiliki masyarakat adalah kelurahan Joyosuran, Semangi, Sangkrah, Pasar Kliwon, Gandekan, Pajang, Tipes, Joyontakan dan Keprabon.
6. Pemerintah dan masyarakat dalam membangun perdamaian dan melakukan penyelesaian konflik belum memiliki jaringan, kerjasama dan komitmen bersama dalam membangun perdamaian di kota Surakarta. Pengelolaan konflik berjalan masih berada pada penyelesaian kasus kriminal oleh polisi. Pemetaan risiko bencana sosial telah menemukan daerah-daerah di tingkat kelurahan memiliki risiko konflik kekerasan yang tinggi. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat bekerja sama dan membangun komitmen bersama untuk melakukan pengurangan risiko bencana sosial dengan melakukan penguatan kapasitas dan mengurangi kerentanan yang ada di kelurahan-kelurahan dengan risiko tinggi.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi ini ingin disampaikan kepada beberapa pihak yang kami berikan rekomendasi berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah Kota Surakarta

- a. Mengkonsentrasikan program-program perdamaian pada daerah-daerah yang memiliki resiko bencana social lebih tinggi.
- b. Hendaknya pemerintah menindak tegas praktik kejahatan dan kemaksiatan yang berkembang di Surakarta sebagai antisipasi atas gerakan Sweeping dan tindak kekerasan oleh laskar yang ada di Surakarta.
- c. Pemerintah juga menindak tegas dari laskar-laskar yang mengambil alih wewenang aparat penegak hukum.
- d. Departemen Agama Kota Surakarta meningkatkan kembali kinerja dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang selama ini terkesan stagnan untuk menjembatani komunikasi antar lembaga keagamaan yang ada di Kota Surakarta.
- e. Program-program Kesbanglinmas harus ditingkatkan agar terhindar dari kesan seremonial. Program-program depolarisasi juga diarahkan ke arah hal yang transformatif dan mampu menghancurkan penghalang antarkelompok di Surakarta.
- f. Resiko bencana sosial yang tinggi berada pada beberapa kelurahan di Kota Surakarta maka kebutuhan untuk dibentuknya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Kota Surakarta sangat dibutuhkan untuk menjadi badan yang melakukan pencegahan bencana sosial.

2. Masyarakat dan Organisasi masyarakat dan keagamaan di Kota Surakarta

- a. Semua elemen keagamaan adalah bagian dari masyarakat Surakarta, maka penyelesaian persoalan masyarakat harus di dialogkan bersama
- b. Masyarakat perlu menggali kearifan lokal untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di dalam masyarakat dan tidak perlu apriori pada kelompok keagamaan tertentu.
- c. Membangun jaringan antar lembaga dan forum sangat dibutuhkan agar tercipta komitmen bersama dalam membangun perdamaian di kota Surakarta.

4. Akademisi

- a. Melalui riset-riset diharapkan adanya analisis yang tajam tentang realitas sosial dan perkembangan metodologi pengurangan risiko bencana sosial
- b. Hasil dari tiset dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengembangkan kegiatan pencegahan konflik maupun transformasi konflik.

Penulis juga mengusulkan model pendekatan rencana aksi pengurangan risiko bencana sosial agar menjadi suatu pertimbangan atau masukan dalam membuat suatu kebijakan publik dan pelaksanaan kegiatan perdamaian dan transformasi konflik, model yang direkomendasikan adalah:

**Tabel V.1. Usulan Model Pendekatan Rencana Aksi
Pengurangan Resiko Bencana Sosial**

Tipe Perubahan	Deskripsi	Metode	Perubahan diharapkan
Penguatan Lembaga Birokrasi	pembentukan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Kota Surakarta	Advokasi dan lobi pemerintah Kota Surakarta dan DPRD	Adanya badan yang memiliki tanggung jawab dalam PRB (pengurangan risiko Bencana) mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan bencana konflik
	Penguatan kapasitas BPBD dalam bencana Sosial di Kota Surakarta	Pelatihan kapasitas dan pendampingan BPBD, membangun jejaring dan koordinasi lintas lembaga.	
Membangun wacana di Akademisi	Mengembangkan metodologi dan pendekatan-pendekatan teoritis dan praktis dalam peace building	Penelitian Pendidikan Training Publikasi Pengawasan Control	Berkembangnya metode dan pendekatan perdamaian dan pengurangan risiko bencana konflik
Penguatan Lembaga masyarakat sosial	Melakukan pendidikan perdamaian	Pendidikan perdamaian	Budaya dialog, toleransi, dan respect sesama stake holder berkembang,
	Membangun kelompok muda damai	Dialog perdamaian Seni dan budaya perdamaian, Membuat group hobby yang berbasis pada perdamaian	
	Membangun simpul-simpul social		
Membangun relasi	Penguatan pendidikan	Penguatan pendidikan perdamaian, membuat	Mengurangi prasangka-

kelompok-kelompok berbeda di Akar Rumput	perdamaian, dan membangun budaya-budaya toleransi dan menghormati perbedaan	kelompok-kelompok inklusif, Membangun forum-forum dialog, Membangun kelompok-kelompok minat yang lintas agama dan etnis	prasangka dari perbedaan Dapat mengurangi risiko bencana konflik di daerahnya dan lintas daerah
Daerah risiko bencana sosial tinggi	Pencegahan	Pendidikan perdamaian, membuat kelompok-kelompok inklusif, Membangun forum-forum dialog, Membangun kelompok-kelompok minat yang lintas agama dan etnis,	Membangun hubungan masyarakat saling menghormati, budaya saling menjaga dan toleransi aktif,
	Kesiapsiagaan	Pendidikan mediasi, Melatih ketua RT, RW menjadi mediator, Melatih keamanan kelurahan dalam menghadapi konflik, Membangun jaringan komunikasi cepat kepada kepolisian.	Membangun kewaspadaan dan antisipasi bencana sosial, Membangun kemampuan dalam komunikasi dalam kondisi konflik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abarquez, Imelda and Murshed, Zubair, *Community-Based Disaster Risk Management*, ADPC, Thailand, 2004
- Abdussalam, Humaidi dan Masnun Tahir, *Islam Dan Hubungan Antar Agama*, LKIS, Jogjakarta, 2007.
- Asian Disaster Reduction Response Network (ADRRN), UNISDR & Humanitarian Forum Indonesia, *Terminologi Pengurangan Risiko Bencana (Indonesian edition)*, Bangkok, 2010
- Faisal, Abdullah *et.al.*, "Program Ketahanan Masyarakat Dan Pendidikan Damai Di Surakarta", dalam *Jurnal Transformasi*, Pusat Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Surakarta, Vol I Juli 2007
- Fanani, Zainudin, *Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, 2000
- Fisher *et.al.*, *Mengelola Konflik*, terjemahan, British Council, Indonesia, 2000.
- Forum Kemanusiaan dan Persaudaraan Indonesia (FKPI), "Catatan Kronologi Kusumodilagan Berdarah Tahun 2010"
- Forum Kemanusiaan dan Persaudaraan Indonesia (FKPI), "Catatan Kasus-kasus konflik dan kekerasan Solo Raya" Tahun 2009
- <http://surakarta.go.id/konten/sejarah-pemerintahan> (di akses pada 13 september 2012)
- <http://surakarta.go.id/konten/visi-misi-dan-lambang> (di akses pada tanggal 17 september 2012)
- <http://www.tempo.co/read/news/2011/07/01/087344239/Perputaran-Uang-di-Surakarta-Capai-Rp-30-Miliar-per-Hari> (di akses pada 17 September 2012)
- Ibrahim, Julianto, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan. Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, Wonogiri: Bina Citra Pustaka, 2003.
- IIRR, Cordaid, *Membangun Ketahanan Masyarakat*. Terjemahan. Filipina, 2007.
- Lederach, John Paul, *Building Peace*, Washington DC, US Institute of Peace press, 1999,.

Lederach, John Paul, *The Moral Imagination*, New York: Oxford University Press, 2005.

Noumen, *Peacework*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

MPBI, GTZ, *CBDRM for CAP Field Practitioner's Handbook*, GTZ, Jakarta,.

Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengurangan Resiko Bencana 2006-2009*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI 2006.

Rudito, Bambang dan Famiola, Melia, *Social Mapping-Metode Pemetaan Sosial*, Rekayasa sains Bandung, Bandung, 2008.

Mashudi, Heri *et.al*, *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit, Studi Radikalisasi Social Wong Sala, Dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta*, LPTP, Surakarta, 1999

Sudarmono, "Peta Kerusuhan SARA di Solo", Makalah yang disampaikan pada Workshop memetakan kerawanan konflik di Kota Surakarta, Forum Perdamaian Lintas Agama dan Golongan (FPLAG) di Yayasan Bakti Kesejahteraan Sosial (YBKS), Surakarta tgl 22 Oktober 2008

Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Yayasan Idep, *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*, Bali, 2007.

NARASUMBER

1. Didik Wahyudiono, Ketua KPU Surakarta dan aktivis LSM di Surakarta, tanggal 4 Desember 2008.
2. M. Dian Nafi' (Tokoh Agama dan pemerhati sosial masyarakat Sala) pada tanggal 23 Oktober 2010
3. Setyo , Penggiat Masyarakat dari LSM Pattiro Surakarta, Surakarta pada tanggal 3 Desember 2008
4. Sudarmono (Budayawan Surakarta), tanggal 28 Oktober 2008
5. Soeharso, Ketua Kesbangpolinmas Surakarta tahun 2008 pada tanggal 15 Desember 2008
6. Istiyarini, Jaksa dari Kejari Surakarta pada tanggal 4 Desember 2009